

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam

Mengenai permasalahan perkawinan dalam pelaksanaannya menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan itu sendiri khususnya mengenai percampuran atau pemisahan harta antara seorang suami dan istri. Adanya pemisahan harta dalam perkawinan pasti didahului dengan pembuatan akta otentik tentang perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris atas dasar kesepakatan para pihak yang tetap didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 atau pada KHI, baik yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan, atau setelah perkawinan yang didasarkan pada Putusan MK No. 69/2015. Pembuatan perjanjian kawin tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap harta bawaan suami maupun terhadap harta bawaan istri. Atas dasar tersebut maka penulis mengangkat judul penelitian yang berjudul perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan ingin menjawab permasalahan mengenai alasan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri, bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan bagaimana wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat *diskriptif analisis* yang dari penelitian akan diambil kesimpulan secara umum dari obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan atau data sekunder yang dipilih dan dihimpun secara sistematis. Analisis permasalahan menggunakan teori perlindungan hukum oleh Roscou Pound dan teori kepastian hukum (Teori *Triadism Law*) oleh Gustav Radburch.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan yang pertama, perlindungan hukum diperlukan terhadap harta suami atau istri tujuannya agar istri terlindungi dari *beheer* suami atau *beschikking* atas barang tertentu milik istri, serta dalam hal pisah harta, agar barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan. Kedua, perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian kawin bagi yang beragama Islam apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merugikan ke Pengadilan, baik mengenai pelaksanaan perjanjian maupun ganti rugi. Ketiga, notaris berwenang dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta perjanjian kawin sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata kunci : Perlindungan hukum, perjanjian kawin, notaris.

ABSTRACT

Legal Protection Against Treasures In the Deed of Marriage Agreement Made by Notary to Indonesian Muslim Citizens

Concerning marital matters in its implementation creates legal consequences for marriage itself, especially regarding the mixing or separation of property between a husband and wife. The separation of property in marriage must be preceded by the making of an authentic deed of the marriage agreement made by the notary on the basis of agreement of the parties which is still based on the provisions of legislation such as the Civil Code, Law no. 1 Year 1974 or on KHI, whether made before marriage or at the time of marriage, or after marriage based on Decision of the Constitutional Court. 69/2015. Preparation of the marriage agreement needs a legal protection of the husband's innate property and the wife's property. On the basis of the above, the authors raised the title of research entitled legal protection of property in the marriage certificate deed made by a notary for Indonesian citizens who are Muslims and want to answer the problem of why the need for legal protection of husband or wife property, how the protection of the law against property In the deed of marriage agreement made by a notary to the citizens of Indonesia who are Muslim and how the authority and responsibility of Notary on the deed of the marriage agreement.

This research uses normative juridical approach method with the research specification is a descriptive analysis which from the research will be taken general conclusion from the object under study. Methods of collecting data by library research or secondary data selected and compiled systematically. Problem analysis uses the legal protection theory by Roscou Pound and the theory of legal certainty (*Theory of Triadism Law*) by Gustav Radburch.

Based on the result of the research, it can be concluded that first, the legal protection is needed to the husband or wife's property so that the wife is protected from the husband's beheer or beschikking on certain goods belonging to the wife, and in separation of the property, so that the goods brought by husband or wife in the marriage are not included in Union of marriage property. Secondly, the legal protection of property in the marriage certificate deeds for the Moslem if one of the parties does not execute the marriage agreement and harms the other, requested compensation to the adverse party to the Court, both on the execution of the agreement and compensation. Third, the notary is authorized and responsible for the making of the marriage certificate deed as an authentic deed which has a permanent legal force in accordance with the provisions of Article 15 and Article 16 of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Position Notary Public.

Keywords: Legal protection, marriage agreement, notary.